

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004:154).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. Salah satu kendala pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan

masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari pemerintah kota dan penambahan dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar di dalam penerapan antar anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik (Sutoro, 2002:45-46).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan seperti yang termuat

dalam pasal 5 ayat 3 Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- h. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Realita dalam masyarakat tepatnya di Kota Malang yang dahulunya memaknai kebersamaan dalam bergotong royong kini sudah sulit ditemui. Masyarakat hanya duduk-duduk santai dirumah tidak mau ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Hadirnya lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat bisa menjadi solusi untuk membantu setiap masalah pembangunan di masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selalu mengkoordinasikan setiap masyarakat agar peduli dengan lingkungan serta pelayanan publik selama ini yang dirasar kurang memuaskan (Kompas, 2014).

Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tercermin dalam Standar Kompetensi kelas X dalam materi peran serta dalam upaya membangun pemerintahan daerah, terdapat pada Kompetensi Dasar menganalisis upaya membangun pemerintahan

daerah dan mendiskripsikan peran serta warga negara dalam pembangunan daerah. Diharapkan nilai kerjasama dan gotong-royong yang akan ditanamkan oleh siswa khususnya tentang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari uraian di atas terlihat jika implementasi peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran dalam Perspektif Perda No 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) masih belum bisa maksimal sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka cukup penting untuk dilakukan penelitian tentang “Implementasi Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam Perspektif Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peran LPMK sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran Surakarta?
2. Bagaimanakah implementasi fungsi LPMK sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran Surakarta?

3. Bagaimanakah kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi peran dan fungsi LPMK sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Tujuan dalam penelitian dapat mengarahkan peneliti untuk mendapatkan apa yang menjadi fokus permasalahan. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan khusus

Untuk mendiskripsikan implementasi peran dan fungsi LPMK sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta.

2. Tujuan umum

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi peran LPMK sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran Surakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan implementasi fungsi LPMK sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran Surakarta.
- c. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi peran dan fungsi LPMK sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran Surakarta.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat luas tentang peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan luas tentang peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Joyosuran sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan hambatan tentang peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Joyosuran terkait Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

E. Daftar Istilah

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
2. Menurut Widjaja (2003:169) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.
3. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
4. Definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”, 2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.
5. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di kelurahan.